

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan kepariwisataan dengan maksud meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan pekerjaan dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian Nasional.¹ Dalam dekade terakhir, banyak negara berkembang menaruh perhatian khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas terlihat dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara masing-masing. Seolah-olah negara yang satu hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih lama tinggal, dan lebih banyak wisatawan yang menghamburkan uangnya di negara yang sedang dikunjungi.²

Dalam menunjang kegiatan/ usaha kepariwisataan yang dimaksud tersebut, dibutuhkan kemudahan-kemudahan yang wujudnya berupa penyediaan dan pelayanan sejumlah fasilitas yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dengan sektor-sektor pengembangan lainnya dan dengan berbagai usaha kepariwisataan seperti penyedia biro perjalanan

¹ Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN, *Menjadikan Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Penghasil Devisa* <http://www.dpr.go.id/dokse/tjen/dokumen/biro-apbn-apbn-MENJADIKAN-PARIWISATA-SEBAGAI-SEKTOR-UNGGULAN-PENGHASIL-DEVISA-1433409452.pdf> diunduh Kamis 3 September 2020 pukul 13:38.

² Oka A Yoeti, 1999, *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT Pertja, hal., 1.

wisata.³ Dalam hal ini Biro Perjalanan wisata/ perusahaan Tours & Travel menjadi pemegang peran utama dalam rangka pengembangan pariwisata, sebab merupakan jembatan penghubung antara konsumen/ wisatawan selaku pihak yang melakukan perjanjian perjalanan wisata dengan pihak penyedia jasa akomodasi atau hotel, restoran, operator adventure tour, operator pariwisata dan lain-lain.⁴ Kenyataannya perjalanan wisata yang dituntut oleh para agen pariwisata menjadi sebuah sarana publikasi terbesar suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Ni Nyoman Indah, RP menjelaskan bahwa agen pariwisata memegang fungsi *intermediary* atau perantara dan *Organizer* pengelola, sehingga secara tidak langsung menempatkan agen pariwisata pada posisi yang penting dalam pembangunan pariwisata.⁵ Menurut Lubis, K (2017), Para penikmat wisata tentu sepakat bahwa rencana perjalanan merupakan salah satu bagian yang paling menarik dari perjalanan wisata. Namun, untuk mengurus akomodasi, transportasi, dan untuk memperoleh semua dokumen yang diperlukan selama perjalanan memang membutuhkan waktu, terutama bagi wisatawan yang mempunyai banyak kegiatan. Oleh sebab itu Biro Perjalanan Wisata akan membantu dalam hal itu sesuai yang permintaan wisatawan, mulai dari biaya reservasi, tiket, tempat tujuan berwisata, hingga pemandu yang akan menemani berlibur. Berdasarkan teori

³ Kadek Novira Hadi Jayanti, A.A. Gde Oka Parwata, "Perjanjian Kerjasama Di Bidang Jasa Antara Hotel Patrabali Dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW) PT. Serum Transport", Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal 2.

⁴ I Putu Gelgel, 2006, "Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum Dan Antisipasinya", Bandung: Refika Aditama, hal., 23.

⁵ Ni Nyoman Indah RP, 2006, Peranan Biro Perjalanan Pariwisata PT. Nawang Tour Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata, Laporan Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Fakultas Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama, hal 43, dalam I Nyoman Surya Dharma Subawa, dkk, "Kompensasi Wajib Penyedia Jasa Perjalanan Wisata Atas Keterlambatan Waktu Keberangkatan Pengguna Biro Jasa Perjalanan Wisata Lokal", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019), hal 5.

diatas pemilihan paket wisata sebenarnya menjadi suatu alternatif pilihan terbaik wisatawan dalam menghemat tenaga, efisiensi waktu dengan harga yang kompetitif.⁶ Masyarakat di Indonesia digolongkan dengan dua tipe perencanaan perjalanan wisata, yaitu perencanaan perjalanan wisata mandiri dan kedua perencanaan perjalanan wisata dengan membeli paket wisata di *travel agent*.⁷ Menurut Nuriata (2014, 11), paket wisata adalah suatu perjalanan wisata dengan satu atau beberapa tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual sebagai harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dari perjalanan.⁸

Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan/ Konsumen Pada hakikatnya sebagai penjual jasa wisata dengan pembeli jasa wisata. Konsumen/ Wisatawan sering dirugikan sebagai akibat dari adanya pelayanan yang kurang maksimal atau kelalaian oleh pihak penyedia jasa perjalanan wisata seperti diantaranya fasilitas dan akomodasi yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan/ yang ditawarkan pihak penyedia jasa, adanya barang yang hilang saat melakukan perjalanan tour, tour guide yang mengecewakan konsumen dan kurang berkompeten, serta keterlambatan alat

⁶ Putri Jolly Carolian Manafe, dkk, "Perencanaan Penyusunan Paket Perjalanan Wisata Di Kabupaten Rote Ndao", JUPAR-Jurnal Pariwisata Vol. 2 No. 02 (November 2019), hal. 116.

⁷ Putri Kusuma Sanjiwani, Luh Putu Kerti Pujani, "Wanprestasi Perjanjian Perjalanan Wisata Luar Negeri Oleh Wisatawan Indonesia", Jurnal IPTA Vol. 7 No. 1, (Juli 2019), hal. 77.

⁸ Nuriata, 2014, Perencanaan Dan Pelaksanaan Perjalanan Wisata Konsep Dan Aplikasi, Bandung; Alfabeta.hal., 11.

transportasi yang akan digunakan dalam melakukan perjalanan maupun keterlambatan dalam perjalanannya.⁹

Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi, memiliki peran penting sebagai pendukung dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi¹⁰. Jika disadari bahwa konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan yang sekaligus juga sumber pemupukkan modal bagi pembangunan, maka untuk keberlangsungan pembangunan nasional diperlukan mutlak perlindungan kepada konsumen.¹¹

Pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi,” pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”¹² dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) “ Pelaku usaha **bertanggung jawab** memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau **kerugian konsumen akibat mengkonsumsi** barang dan/atau jasa yang

⁹ Septira Putri Mulyana, Febrina Triswati, “Tanggung Jawab Perusahaan Tour & Travel Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi Di PT. Tiga Bidadari Wisata Tours & Travel)”, Jurnal Perspektif Vol. 24 No. 3 (September 2019), hal., 132.

¹⁰ Galuh Puspaningrum, 2015, Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 56.

¹¹ Arfian Setiantoro, dkk, “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Senketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 7, Nomor 1 (April, 2019), hal. 2.

¹² Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dihasilkan atau diperdagangkan.”¹³ Namun dalam prakteknya dimasyarakat, I Made Surya Adhitthana (2018,8) berpendapat pada penelitiannya bahwa pihak travel seringkali melepaskan diri dari **tanggung jawab** atas hilangnya barang milik pengguna jasa karena adanya dasar klausula baku atau perjanjian standar, pengguna jasa dianggap telah mengetahui aturan pada perjanjian yang telah dibuat oleh pihak travel tersebut¹⁴. Kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab pihak penyedia jasa, sebab adanya fungsi khusus Biro Perjalanan Wisata untuk menjamin fasilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen dengan sesuai apa yang tertera pada “janji jasa perjalanan wisata” yang selanjutnya dijual dalam bentuk “brosur perjalanan wisata”.¹⁵

Perkembangan jumlah konsumen yang meningkat pesat ini dapat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara produsen dengan konsumen dalam bertransaksi, serta hubungan antara pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata dengan pelaku usaha lainnya atau pihak-pihak terkait yang melakukan perjanjian dengan Biro Perjalanan Wisata didalam memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁶ Juga apabila aspek keselamatan itu dihiraukan,

¹³ Pasal 19 ayat (1), *Ibid.*

¹⁴ I Made Surya Adhitthana, dkk, ”Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Atas Kerusakan Barang Bawaan Milik Pengguna Jasa Pada PT. Bali Sinar Permata Tour & Travel Di Denpasar”, Jurnal Kertha Semaya, Jilid 6, Terbitan 5, (November, 2018, Hal. 8.

¹⁵ Kevin Kurniawan, “Modul-7 Agen Perjalanan”, <http://www.slideshare.net/kevinkurniawan14019/modul-7-agen-perjalanan> , diunduh pada 21 November 2020 pukul 14:11.

¹⁶ Septira Putri Mulyana, Febrina Triswati. *Loc., Cit.*

maka akan timbul dampak negatif terhadap daya saing produk jasa.¹⁷ Pelaku usaha berperan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terkait barang atau jasa, namun apabila kesalahan atau kelalaian tersebut bukan berasal dari pelaku usaha, maka kerugian konsumen dapat ditekan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa belum semua pelaku usaha dapat berperilaku demikian, sehingga disisi lain konsumen sepatutnya dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup agar terhindarkan dari adanya kerugian oleh kesalahan atau kelalaian pelaku usaha¹⁸, topik penelitian ini benar-benar perlu diolah kembali dari penelitian skripsi sebelumnya.

Penelitian ini sebagaimana Pasal 30 ayat (1) yang oleh pemerintah, masyarakat diperbolehkan ikut berpartisipasi pada pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan,¹⁹ dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei atas barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar²⁰ serta visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka mengembangkan hukum melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkompetensi dengan berbasis nilai-nilai keislaman yang memberi arah pada perubahan.

Dari latar belakang tersebut oleh sebab itu penulis memilih judul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM

¹⁷ I Nyoman Surya Dharma Subawa, dkk, “Kompensasi Wajib Penyedia Jasa Perjalanan Wisata Atas Keterlambatan Waktu Keberangkatan Pengguna Biro Jasa Perjalanan Wisata Lokal”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)

¹⁸ I Made Surya Adhitthana, dkk, *Op. Cit.*, hal. 11.

¹⁹ Pasal 30 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Penjelasan Pasal 30 ayat (3), *Ibid.*

PADA PERJANJIAN PAKET WISATA ANTARA BIRO PERJALANAN WISATA DENGAN KONSUMEN DI SOLO RAYA. (Studi Batari Tours Travel Pada PT. Lajangiroe)’’.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian hukum, bukan kuantitas jawaban yang menentukan mutu sebuah penelitian, melainkan kualitas jawabannya. Dengan demikian agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah, pembatasan masalah menjadi hal yang penting dalam penelitian.²¹ Penelitian ini akan dibatasi pada Tanggung Jawab Hukum Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen Di Solo Raya Pada Perjanjian Paket Wisata Dengan Analisa Secara Yuridis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah serta bertitik tolak pada uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen?
- b. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Dari Adanya Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen?
- c. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen Di Solo Raya?

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 61-62.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang peneliti ingin capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk Mengetahui Bentuk Dan Isi Perjanjian Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen.
- b. Untuk Mengetahui Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Dari Adanya Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen.
- c. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen Di Solo Raya.

2. Manfaat Penelitian

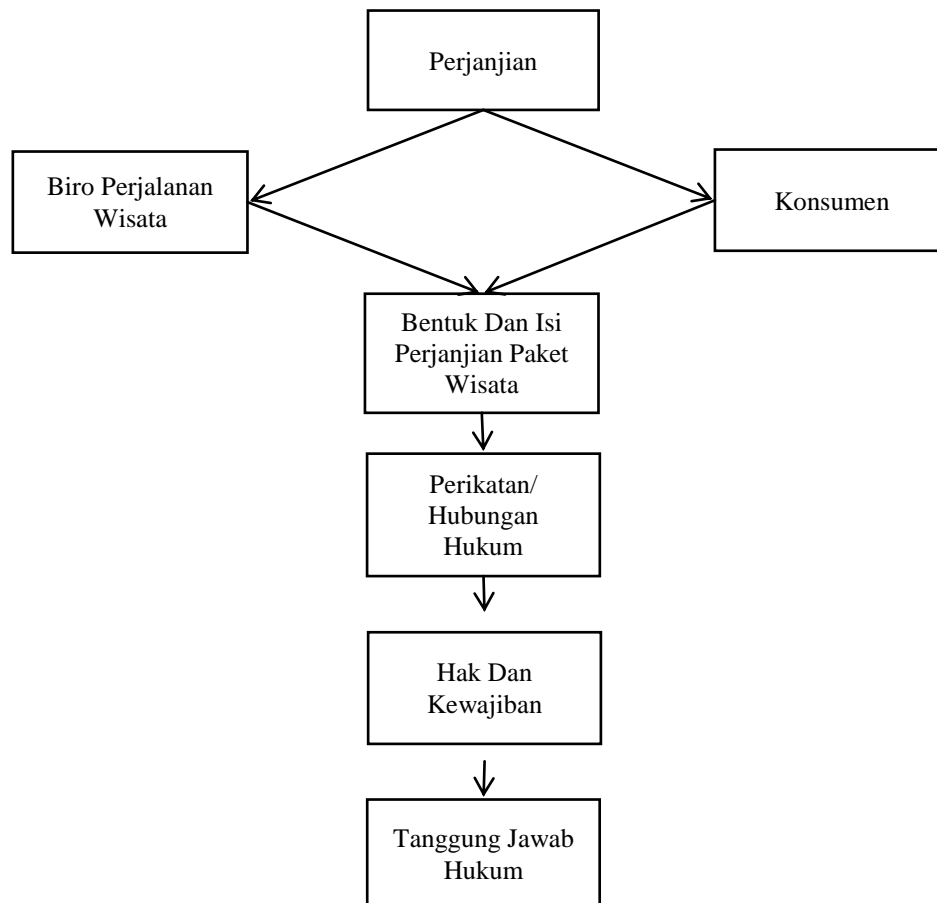
a. Manfaat Teoritis

- 1) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir dari teori yang telah didapat pada perkuliahan.
- 2) Hasil untuk mendeskripsikan sistem pelayanan jasa biro perjalanan wisata dengan konsumen pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi kepada pembaca berdasarkan data yang diperoleh baik secara pustaka maupun keadaan yang sebenarnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Guna menjadi sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah dan/atau gejala yang terjadi terkait kegiatan perjanjian antara jasa Biro Perjalanan Wisata dengan Konsumen dari segi hukum;
- 2) Memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Mengenai arti “perjanjian” diatur pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, menurut Dadang Sukandar (2011, 5) Perjanjian merupakan tindakannya atau “perbuatan hukum”. perbuatan hukum tersebut memunculkan adanya hubungan hukum “perikatan” di antara para pihak yang mengadakan perjanjian.²² Perikatan merupakan perhubungan hukum antara

²² Dadang Sukandar, 2011, Membuat Surat Perjanjian, Yogyakarta: C.V Andi Offset, hal. 5.

dua pihak, dimana terdapat pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan hak tersebut.²³

Yang dimaksud Biro Perjalanan Wisata pada Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata yaitu **usaha penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah**²⁴. Dalam Undang-undang Pariwisata, Biro Perjalanan Wisata termasuk salah satu dari dua jenis usaha jasa perjalanan wisata²⁵, dimana usaha jasa perjalanan wisata merupakan bagian dari Usaha Pariwisata.²⁶ Sedangkan orang perseorangan atau badan usaha baik beradan hukum maupun bukan berbadan hukum berkedudukan dan menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia disebut pelaku usaha.²⁷ Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau **jasa** yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸

Terdapat Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu; 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.²⁹ Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan.³⁰ M Yahya Harahap (1986, 9)

²³ Subekti, 1983, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa. Hal., 1.

²⁴ Pasal 1 Angka 3, Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

²⁵ Pasal 4, Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata, *Op. Cit.*

²⁶ Pasal 14 ayat (1) huruf d, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.

²⁷ Pasal 1 Angka 3, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Pasal 1 Angka 2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹ Pasal 1320, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³⁰ Billy Dicko Stepanus Harefa, Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi", Jurnal Privat Law Vol. IV No. 2, (Juli 2016), hal. 113.

berpendapat bahwa perjanjian memiliki “sifat yang dapat dipaksakan” (afduringbaarheid). Dalam perjanjian, kreditur/ schuldeiser berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tersebut dilindungi oleh hukum berupa sanksi, artinya kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa debitur/ schuldenaar dalam menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/ prestasi yang mereka perjanjikan.³¹ Pihak yang berhak menuntut dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang.³²

Dalam hukum perlindungan konsumen sangat penting untuk memegang prinsip tanggung jawab hukum. Perlu kecermatan dalam menganalisa pihak mana yang harus bertanggung jawab serta luas cakupan tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak bersangkutan.³³ Menurut Hans Kelsen (2006, 95) Konsep kewajiban hukum saling berkaitan dengan konsep Tanggung Jawab Hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atau memikul tanggung jawab hukum dalam perbuatannya, artinya ia bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila dalam perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³⁴

E. Metode Penelitian

Berikut metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

³¹ M Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT.Alumni, hal. 9.

³² Subekti, 1983, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, hal., 1.

³³ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, hal. 80.

³⁴ Hans Kelsen, 2011, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Bandung: Nusa Media, hal.95.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif yang bersifat memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Sekunder

Terdiri dari bahan primer yang bahan tersebut isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, bahan sekunder yang isinya membahas bahan primer,³⁷ dan Bahan Hukum Tersier yang

³⁵ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 13-14.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.50.

³⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 103.

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸

- i. Bahan Hukum Primer meliputi; Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pariwisata, dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.
- ii. Bahan Hukum Sekunder meliputi; buku, internet, artikel, laporan penelitian, makalah, berabagai karya tulis ilmiah lainnya.
- iii. Bahan Hukum Tersier meliputi; kamus, buku pegangan, almanak, atau referensi/acuan lainnya.³⁹

b) Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan perolehan data melalui studi kasus di Batari Tours Travel pada PT. Lajangiroe.

4. Responden Dari Penelitian

Orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri⁴⁰ yaitu Ny. Mirza Ananda selaku pemilik dan / atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Batari Tours Travel Pada PT. Lajangiroe yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 351, Pabelan, Kartasura.

³⁸ Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 19.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, Hal. 104.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 22.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a) Studi Kepustakaan

Melakukan pencarian, pencatatan, menganalisis, dan mempelajari literatur-literatur yang berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan masalah yang diteliti oleh penulis.

b) Wawancara

Perolehan keterangan secara lisan dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka⁴¹ terkait yang menjadi permasalahan pada penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap Ny. Mirza Ananda selaku pemilik dan / atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Batari Tours Travel pada PT. Lajangiroe yang beralamatkan Jl. Ahmad Yani No. 351, Pabelan, Kartasura.

6. Metode Analisis Data

Analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan menguraikan data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis serta tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam mengimplementasikan data dan pemahaman dari hasil analisis.⁴²

⁴¹ Ibid, hal. 94.

⁴² Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 11.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam memberikan gambaran dan mempelajari isinya.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian
 - 4. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, Perbuatan Melawan Hukum
 - 5. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata
 - 1. Industri Pariwisata
 - 2. Dasar Hukum Biro Perjalanan Wisata
 - 3. Fungsi Biro Perjalanan Wisata
 - 4. Paket Wisata
- C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
2. Macam-Macam Dasar Pertanggungjawaban
3. Macam-Macam Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Bentuk Dan Isi Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen
2. Hak Dan Kewajiban Yang Timbul Dari Adanya Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen
3. Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Paket Wisata Antara Batari Tours Travel Dengan Konsumen.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA